

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN DALAM SUATU PERUSAHAAN KELOMPOK**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RATNA YULIANI

NIM: C 100.080.043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## PERSETUJUAN

Naskah Publikasi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



M. Sandjaya SH., M. Hum

Pembimbing II



Inayah, SH., M. H

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Ikhsan, S.H., M.H)

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN DALAM SUATU PERUSAHAAN KELOMPOK**

**RATNA YULIANI**

**C 100.080.043**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**ABSTRAKSI**

*Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi karena pertumbuhan perkembangan perusahaan grup yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu grup.*

*Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah.*

*Hasil Penelitian menunjukan bahwa “tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam suatu perusahaan kelompok” adalah Hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan setelah terjadinya merger merupakan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan demikian Induk perusahaan dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Antara anak perusahaan dengan induk perusahaan masing-masing kedudukannya berdiri sendiri. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri yang merupakan hukum yang positif bagi Perseroan Terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal. Jika ada pihak yang menggugat anak perusahaan, apabila ada anak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak, maka yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan adalah anak perusahaan itu sendiri. Induk perusahaan tidak perlu diikutsertakan digugat, karena secara hukum anak perusahaan bertanggung jawab sendiri didalam melakukan aktifitasnya*

*Kata Kunci: Tanggung jawab, Induk Perusahaan.*

**ABSTRACT**

*Company groups or better known as the conglomerate as growth development group companies that are not controlled can lead to a monopoly of the business network relationships that exist among members of a group company can be defined as the relationship between the legal entities that exist within a group.*

*This study used the method of normative legal research or collectively, the methods of literature. Normative legal research is the only research process and use of secondary data related to the problem.*

*Research results show that “Responsibility for the subsidiary holding company in a corporate group” is a legal relationship between the parent*

*company with subsidiaries after the merger is the parent company as the majority shareholder of its subsidiary holding company and thus can control the company with majority ownership stake. Between the subsidiary and the parent company of each stand-alone position. Parent company and its subsidiaries have their own statutes?-Self which is the law that is positive for the Limited Liability Company which if breached will result in the transaction being made is void. If there are parties who sued subsidiaries, if any subsidiary rights violations, which was sued by the aggrieved party is itself a subsidiary. The parent company does not need to be included sued, because legally responsible for its own subsidiaries in doing activities.*

*Key words : Responsibility, Parent Company.*

## **PENDAHULUAN**

Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan grup yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan grup itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hokum yang ada didalam suatu grup tersebut; yaitu badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan itu dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterikatan yang erat baik satu sama lain; dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan gaya dan pola yang sama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Emmy Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang*; Perusahaan kelompok (group company/concern) ,  
Jogyakarta : Universitas Gajah Mada, hal. 5.

Akan tetapi bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait didalam satu perusahaan grup haruslah perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum pun dapat bergabung didalam suatu perusahaan grup, misalnya perusahaan berbentuk Firma, CV (*commanditeir Vennootschaap* atau perseroan), menjadi anak-anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang bersatus badan hukum”.<sup>2</sup>

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai *holding company* atau perusahaan Induk.<sup>3</sup>

Apa yang dimaksud dengan *holding company* atau disebut juga Perusahaan Induk dalam bahasa Indonesia, adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 7

<sup>3</sup> Ibid

banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh dan, (3) prosedur terprogram.

#### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang demikian diatas maka akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu antara lain sebagai berikut :1. Bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang dibentuk melalui merger ?2. Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perikatan yang dilakukan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok ?

#### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang dibentuk melalui merger.2. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perikatan yang dilakukan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok

#### Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Penulis menggunakan metode penulisan antara lain:1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan

menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam suatu Perusahaan kelompok”<sup>2</sup>. Sumber Data Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah: a. Bahan Hukum Primer Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang “Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam suatu Perusahaan kelompok”, seperti: jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah, c. Bahan Hukum Tertier Yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Perseroan Terbatas**

Definisi mengenai perseroan terbatas tidak dijumpai dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumantoro (1991 : 40) dari pasal-pasal : 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan. 2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang

berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.<sup>3</sup> Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.<sup>4</sup>

### **Perusahaan Kelompok**

Sedangkan menurut Christianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok ialah salah satu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan baik vertikal maupun horisontal.<sup>5</sup> Emmy pangaribuan mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.<sup>6</sup> Demikian juga pengertian perusahaan kelompok didefinisikan oleh S.M Bartman sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri

---

<sup>4</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 24.

<sup>5</sup> Sulistiawaty, *Tanggung jawab perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak*, Tesis Pasca Sarjana, UGM, 2008, hal. 43

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hal 1



sendiri dibawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun dalam suatu kesatuan<sup>7</sup>.

### **Jenis Perusahaan Kelompok.**

Menurut jenis variasi usahanya, para sarjana membagi perusahaan kelompok ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan kelompok vertikal dan perusahaan kelompok horisontal. Emmy Pangaribuan mendefinisikan jenis perusahaan kelompok sebagai berikut :1. Perusahaan kelompok vertikal. 2. Perusahaan kelompok horisontal

### **Pembentukan Perusahaan Kelompok**

Raaijrnakers memandang bahwa pengertian *joint venture* dapat dilihat dari bentuk kerjasama yang parsial antara perusahaan-perusahaan yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri". Menurut Emmy Pangaribuan, dalam kerjasama *joint venture* hanya sebagian hanya sebagian tertentu dari kegiatan ekonomi perusahaan masing-masing mitra yang dibawa kedalam suatu perusahaan bersama. Persamaaannya dengan fusi ialah adanya penggabungan kegiatan-kegiatan perusahaan bersamasama. Akan tetapi berbeda dengan fusi karena di dalam hubungan kerjasama *joint venture* hanya sebagian dari kegiatan perusahaan *joint venture* hanya sebagian dan kegiatan perusahaan dan masing-masing mitra yang yang bekerjasama digabung. Sedangkan menurut Van Schilfgaarde, dalam fusi organisasi yang berdiri sendiri ditarik bersama-sama di bawah satu pimpinan, sehingga dari segi ekonomi membentuk suatu kesatuan<sup>8</sup>.

### **Proses Hukum pembentukan Perusahaan Induk**

Perusahaan Induk sering juga disebut dengan *Holding Company, parent*

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

<sup>8</sup> Munir Fuady, Op.cit, hal. 19

*company*, atau *Controlling Company*. Yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu Perusahaan Induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.<sup>9</sup>

### **Keuntungan Dan Kerugian Dari Perusahaan Induk**

Eksistensi suatu grup usaha konglomerat cenderung untuk mempunyai perusahaan induk (*holding*) , tetapi keberadaan dari perusahaan induk itu sendiri punya keuntungan dan kerugian. Di antara keuntungan mempunyai suatu perusahaan induk dalam suatu kelompok usaha adalah sebagai berikut: 1. Kemandirian Risiko, 2 Hak Pengawasan Yang Lebih Besar 3. Pengontrolan Yang Lebih Mudah Dan Efektif 4. Operasional Yang Lebih Efisien 5. Kemudahan Sumber Modal, 6. Keakuratan Keputusan Yang Diambil

### **Klasifikasi Perusahaan Induk**

Variasi hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan induk.klasifikasi perusahaan induk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai criteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam hal equity.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan dalam paradigma hukum bisnis* Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, hal.95

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok**

Perusahaan kelompok merupakan suatu fenomena dibidang hukum perusahaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dalam kegiatan usaha. Hal ini selanjutnya diperlukan manakala sebuah kelompok perusahaan bergerak dalam berbagai bidang bisnis yang tidak saling terkait (unrelated) suatu usaha yang dalam praktek lebih dikenal dengan konglomerasi.<sup>11</sup>

### **Kewenangan Anak Perusahaan Dalam Melakukan Perikatan**

Perkembangan yang konsisten tentang apa yang dianggap merupakan kewenangan umum dari perusahaan yang umumnya di atur dalam perundang-undangan dibidang perusahaan, dan dikonkretkan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Perkembangan yang konsisten tersebut adalah perkembangan ke arah pengakuan yang lebih luas kepada wewenang dari suatu perusahaan. Secara teoritis kita dapat membedakan antara kewenangan (*powers*) perusahaan dengan maksud dan tujuan (*purposes*) dari suatu perusahaan. Kewenangan adalah suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga. Timbulnya Anak perusahaan akibat proses merger yang berbentuk Perseroan Terbatas, mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban

---

<sup>11</sup> HMU Fattowi Assari, “Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company”, Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 54

sendiri, Dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya.

### **Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Anak Perusahaan**

Sebuah Perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga. Perusahaan melakukan transaksi jual beli, kredit dari perbankan, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Biasanya kalau transaksinya dapat berjalan dengan lancar atau tidak ada masalah kondisinya akan aman-aman saja, namun bila terjadi sebaliknya terjadi masalah misalnya perusahaan melakukan wanprestasi maka yang dicari adalah yang menyangkut tanggung jawab. Berhubung yang melakukan transaksi adalah suatu Perusahaan maka mengenai masalah tanggung jawab dipengaruhi oleh statusnya, apakah berstatus badan hukum atau tidak. Adanya perbedaan status tersebut berpengaruh pada siapa yang harus bertanggung jawab.<sup>12</sup>

### **Tanggung jawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat kebendaan.**

Induk perusahaan dapat melakukan kontrak-kontrak yang bersifat kebendaan dalam hubungan dengan kegiatan anak perusahaan. Sehingga, tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sampai batas-batas tertentu dapat dibebankan kepada induk perusahaan. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam hal aset-aset dari induk perusahaan ikut menjadi *collateral* terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh anak perusahaan.

Contohnya, dalam usaha menyelamatkan grup konglomerat summa pada

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 135.

tahun 1992 tempo hari, saham-saham dari grup konglomerat Astra milik pemilik grup Astra tersebut diagunkan untuk menjamin hutang-hutangnya Bank summa sebagai anak perusahaan grup summa, walaupun kemudian ternyata bahwa hal tersebut tidak dapat menolong grup summa yang sedang kesulitan kala itu. Karena tidak terselamatkan, akhirnya diperintahkan oleh pemerintah agar Bank summa dilikuidasi. Dan, sebagaimana kita ketahui, bahwa grup konglomerat Astra dan summa kala itu sama-sama dimiliki oleh keluarga William Surdjaja.<sup>13</sup>

### **Tanggung jawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat personal.**

Untuk menembus tanggung jawab mandiri dari suatu badan hukum, *in casu* tanggung jawab dari anak perusahaan, sehingga induk perusahaan dapat juga dimintakan tanggung jawabnya atas bisnis anak perusahaan, dalam hal ini dapat juga dibuat kontrak-kontrak yang bersifat personal. Dilakukan misalnya untuk menjamin hutang-hutangnya anak perusahaan. Misalnya, dengan membuat *corporate guarantee, personal guarantee*, atau garansi terbatas.<sup>14</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:1. Hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan setelah terjadinya merger adalah induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan demikian Induk perusahaan dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2007), hal.91

kepemilikan mayoritas saham. Antara anak perusahaan dengan induk perusahaan masing-masing kedudukannya berdiri sendiri. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri yang merupakan hukum yang positif bagi Perseroan Terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal. Jika ada pihak yang menggugat anak perusahaan, apabila ada anak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak, maka yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan adalah anak perusahaan itu sendiri. Induk perusahaan tidak perlu diikutsertakan digugat, karena secara hukum anak perusahaan bertanggung jawab sendiri didalam melakukan aktifitasnya.

2. Induk perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaannya (wanprestasi) bila dapat dibuktikan bahwa:

a. Adanya campur tangan induk perusahaan ke dalam bisnis anak perusahaan seperti misalnya :

- 1) ikutnya induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis, yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit.
- 2) perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.
- 3) Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.

b Tanggung jawab induk perusahaan karena doktrin *piercing the corporate veil* ,

- 1) Pengontrolan anak perusahaan oleh induk perusahaan
- 2) Penggunaan kontrol oleh induk perusahaan untuk melakukan penipuan, ketidak jujuran, dan tindakan yang tidak fair lainnya.
- 3) Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran

kewajiban atau tugas dari induk perusahaan Perluasan tanggung jawab pemegang saham mayoritas/induk perusahaan berdasarkan ikatan kontraktual misalnya dengan dengan membuat *corporate guarantee*, *personal guarantee*, atau garansi terbatas

### **Saran**

Sebaiknya Untuk mengetahui dengan jelas seluk beluk, mekanisme dan tanggung jawab dalam perusahaan grup hendaklah masalah perusahaan kelompok diatur dalam Peraturan Pelaksana dari undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dengan diaturnya perusahaan group/kelompok kedalam perundang-undangan, maka kepentingan pihak ketiga dapat dilindungi dan agar pertumbuhan perusahaan grup/kelompok tidak menjurus pada praktek monopoli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Emmy Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern)* , Jogjakarta : Universitas Gajah Mada
- Gatot Supramono, 2007, *Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*, Buku kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perusahaan dalam paradigma hukum bisnis* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Bandung.